

No. Publikasi : 7326.1009



**INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI**  
**KABUPATEN TORAJA UTARA**  
*Construction Price Index of Toraja Utara*

**2012**



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**KABUPATEN TORAJA UTARA**

**DATA  
MENCERDASKAN  
BANGSA**

<http://torutkab.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara**  
JL. A. Yani No. 64 Rantepao, Toraja Utara 91831  
Telp. (0423) 21262

**INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN TORAJA UTARA  
TAHUN 2012**

**No. Publikasi** : 73264.0701

**Ukuran Buku** : 23 cm x 17 cm

**Jumlah Halaman** : 35 Halaman

**Naskah** : Staf Seksi Nerwilis BPS Toraja Utara

**Penyunting** : Kepala BPS Toraja Utara

**Gambar Kulit** : Staf Seksi Nerwilis BPS Toraja Utara

**Diterbitkan oleh** : BPS Kabupaten Toraja Utara

**Dicetak Oleh** :

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya**

## KATA SAMBUTAN

Dalam era globalisasi, data atau informasi mempunyai posisi strategis sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama dalam mencari peluang bisnis bagi pelaku ekonomi serta penentuan kebijakan Pemerintah dalam pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, BAPPEDA Kabupaten Toraja Utara bersama BPS Kabupaten Toraja Utara terus berupaya untuk menyajikan data yang diharapkan dapat membantu para konsumen data baik swasta maupun pemerintah.

Salah satu sajian data dalam bentuk publikasi ini adalah “Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012” yang memuat data Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Toraja Utara tahun 2012. Penghitungan angka indeks ini dilakukan oleh BPS, dengan menggunakan data dasar hasil survei harga perdagangan besar sektor konstruksi dan hasil survei Keuangan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan oleh BPS daerah. Angka indeks ini merupakan salah satu dari lima variabel yang digunakan dalam penghitungan DAU dan merupakan salah satu indikator teknis dalam penentuan daerah penerima DAK.

Kami sadari bahwa publikasi ini masih kurang sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kami sampai terbitnya publikasi ini kami ucapkan terima kasih, semoga publikasi ini bermanfaat adanya.

Rantepao, Juli 2013

BADAN PUSAT STATISTIK  
Kabupaten Toraja Utara  
Ke p a l a,

**SAMINGUN, S.Si**  
**NIP. 19600124 198202 1 001**

DAFTAR ISI

	Hal
<b>Kata Sambutan</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Daftar Tabel dan Grafik</b>	iii
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	4
1.3. Cakupan Data	4
II. Konsep dan Definisi	5
III. Metodologi	14
IV. Perkembangan IKK	19
Perkembangan Metode Penghitungan Indeks	
4.1 Kemahalan Konstruksi (IKK)	19
Pertumbuhan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	
4.2 Kabupaten Toraja Utara	21
V. Kesimpulan	26
Lampiran	28

DAFTAR  
TABEL, GRAFIK dan GAMBAR

No.	Judul Grafik	Hal
Gambar 1.	Besaran Dana Alokasi Umum Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004	3
Tabel 2.1.	Perbedaan Antara Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)	6
Tabel 4.1.	Perbandingan Nilai IKK di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 - 2012	24
Grafik 5.1.	Laju Nilai IKK Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2012	15

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, yang pelaksanaannya didasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 dan direvisi melalui UU No.32 Tahun 2004, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui kekhasan dan potensi unggulan di daerah masing-masing.

Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005, untuk membiayai seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi tersebut, pemerintah mengalokasikan dana perimbangan keuangan yang terdiri atas dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Sejak tahun 2008, perhitungan DAU menggunakan perhitungan/formula DAU murni tanpa dana penyesuaian (*Non-Harmless*) dimana hal tersebut memungkinkan suatu daerah untuk mengalami penurunan jumlah DAU yang diterima dari tahun sebelumnya jika tidak dapat menduga kebutuhan potensi daerahnya dengan baik. Oleh karena itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan meminta Badan

Pusat Statistik untuk menyediakan beberapa indikator yang diperlukan untuk menghitung kebutuhan DAU suatu daerah, seperti indeks jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks produk domestik bruto (PDRB) per kapita serta indeks kemahalan konstruksi (IKK). Angka-angka indeks tersebut diperlukan dalam menghitung celah fiskal suatu daerah. Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal suatu daerah/wilayah, yaitu estimasi jumlah anggaran yang diperlukan suatu daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik untuk masyarakat setempat yang diukur melalui jumlah penduduk, luas wilayah, dan berbagai macam angka indeks seperti indeks PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia (IPM) dan IKK itu sendiri, dengan potensi fiskal yang dimiliki oleh daerah/wilayah tersebut. Terdapat beberapa kemungkinan dalam penghitungan celah fiskal untuk menentukan besaran DAU, yaitu :

1. Apabila Celah Fiskal positif ( $CF > 0$ ) atau potensi fiskal lebih besar daripada kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah dengan nilai Celah Fiskal.
2. Apabila Celah Fiskal sama dengan nol ( $CF = 0$ ) atau kebutuhan fiskal sama dengan potensi fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar.
3. Apabila Celah Fiskal negatif ( $CF < 0$ ) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal lebih kecil dari alokasi dasar, maka daerah akan menerima



DAU sebesar alokasi dasar dikurangi dengan nilai celah fiskal.

4. Apabila Celah Fiskal negatif ( $CF < 0$ ) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka hasil penghitungan DAU adalah nol atau negatif. Untuk kasus negatif akan disesuaikan menjadi nol yang berarti daerah tidak menerima DAU.

**Gambar 1.**

**Besaran Dana Alokasi Umum Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004**



## 1.2 Tujuan Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Selain sebagai salah satu *variable* yang digunakan dalam menghitung besaran DAU pada suatu daerah, indeks kemahalan konstruksi (IKK) juga berfungsi untuk menggambarkan tingkat kesulitan dalam menempuh struktur geografis suatu wilayah. Oleh karena itu, semakin sulit medan/kondisi geografis suatu wilayah, maka akan semakin tinggi angka IKK yang berlaku pada wilayah tersebut.

## 1.3 Cakupan Data

Data dasar yang digunakan dalam penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi kabupaten/kota adalah data harga perdagangan besar bahan bangunan konstruksi dan sewa alat berat yang dikumpulkan pada saat pencacahan serentak. Data harga yang dikumpulkan mencakup 19 jenis barang dan 86 kualitas barang serta harga sewa 4 jenis alat berat dan upah jasa konstruksi.

Data lain yang dikumpulkan adalah realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Toraja Utara tahun 2008 dan 2009, yang mencakup kegiatan pembangunan fisik gedung/konstruksi dari masing-masing kelompok jenis bangunan, sebagai dasar untuk menghitung Diagram Timbang Umum. Data ini diperoleh dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, melalui Survei Keuangan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan oleh BPS setiap tahun.

## BAB II

### KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi (TKK) pada suatu daerah (wilayah kabupaten/kota atau provinsi) terhadap TKK rata-rata nasional. Sesuai dengan pemahaman tersebut, IKK dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang dapat menjelaskan perbandingan harga suatu komoditi tertentu pada lokasi yang berbeda-beda dalam kurun waktu/periode tertentu. Hal itu pula yang membedakan IKK dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), yang selama ini digunakan sebagai eskalasi (pertambahan kuantitas/jumlah) nilai proyek suatu konstruksi. Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada tabel berikut yang memuat perbedaan antara IKK dengan IHPB.

TKK sendiri merupakan suatu angka yang mewakili nilai bangunan/konstruksi atau biaya yang dibutuhkan dalam membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas bangunan di suatu wilayah (kabupaten/kota atau provinsi). Nilai TKK didapatkan melalui pendekatan terhadap harga sejumlah barang/bahan bangunan dan harga sewa alat-alat berat yang mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan konstruksi/infrastruktur di suatu wilayah.

Tabel 2.1.

**Perbedaan Antara Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Dengan  
Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)**

NO	IKK	IHPB
1	Merupakan indeks spasial, membandingkan harag pada lokasi yang berbeda-beda namun pada kurun waktu yang sama	Merupakan indeks periodik, membandingkan harga untuk lokasi yang sama pada waktu yang berbeda
2	Yang di jadikan acuan/ <i>reference</i> dalam penghitungannya adalah rata-rata	Yang di jadikan acuan/ <i>reference</i> dalam penghitungannya adalah tahun dasar
3	Perbandingan harga antar wilayah	Perubahan harga antar waktu
4	Perbedaan struktur harga relatif besar	Perubahan struktur harga relatif kecil
5	Comparability dan representative sulit diperoleh	Comparability dan representative mudah diperoleh

Pada dasarnya, penghitungan IKK mengacu pada pengelompokan jenis bangunan konstruksi yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2005, yaitu :

1. **Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal**, mencakup rumah dan gedung yang digunakan untuk tempat tinggal oleh rumah tangga. Bangunan bukan tempat tinggal meliputi hotel, sekolah, rumah sakit, pusat pertokoan, perkantoran dan pusat perdagangan, industri atau pabrik, bangunan perdagangan, bangunan tempat pemeliharaan hewan, ternak dan unggas, bangunan tempat ibadah, bangunan gedung kesenian dan olahraga serta bangunan bukan tempat tinggal lainnya.
2. **Prasarana Pertanian**, meliputi pembuatan kolam pemeliharaan ikan, pintu pengendali air, bagan, percetakan tanahsawah, pembukaan hutan, irigasi, dan sejenisnya.
3. **Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan**, mencakup pembuatan sarana jalan dan jembatan untuk angkutan jalan raya maupun kereta api, pelabuhan laut dan udara, dermaga, landasan pesawat terbang, tempat parkir, trotoar dan sejenisnya.
4. **Bangunan & Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komunikasi**, mencakup bangunan pengolahan penyaluran dan penampungan air bersih/air limbah/drainase, bangunan pengolahan/penyaluran dan

penampungan barang migas, bangunan elektrikal, konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, konstruksi telekomunikasi navigasi udara, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi, konstruksi elektrikal dan telekomunikasi lainnya, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, instalasi listrik bangunan sipil, instalasi navigasi laut dan sungai, instalasi meteorologi dan geofisika, instalasi navigasi udara, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, instalasi sinyal dan rambu - rambu jalan raya, instalasi telekomunikasi.

5. **Bangunan Lainnya**, mencakup bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya, pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Namun, dikarenakan tidak semua wilayah (kabupaten/kota atau provinsi) di Indonesia memiliki kelima jenis bangunan konstruksi di atas, maka penghitungan IKK pun disesuaikan menjadi hanya mengacu pada 3 (tiga) kelompok jenis bangunan konstruksi saja agar angka IKK yang dihasilkan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dihasilkan dapat lebih

mempunyai keterbandingan/*comparable*. Adapun 3 (tiga) kelompok jenis bangunan konstruksi tersebut adalah :

1. **Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal**, yang terdiri dari :
  - a. konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun dan perumahan dinas.
  - b. konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal, stasiun dan bangunan monumental.
2. **Bangunan Pekerjaan Umum Untuk Jalan, Jembatan dan Pelabuhan**, yang terdiri dari :
  - a. bangunan jalan, jembatan dan landasan, meliputi pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas.
  - b. bangunan jalan dan jembatan kereta.

- c. Bangunan dermaga, meliputi pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang.

**3. Bangunan Lainnya**, yang meliputi bangunan sipil, bangunan pekerjaan umum, bangunan elektrik, konstruksi telekomunikasi, instalasi air, listrik, gas serta pipa.

Data dasar penghitungan IKK adalah harga bahan bangunan/konstruksi, upah dan sewa alat berat yang diperoleh dari survei secara serentak untuk seluruh kualitas dari jenis barang yang memberikan andil besar dalam pembuatan suatu bangunan/konstruksi di seluruh kabupaten/kota. Bahan-bahan bangunan, upah serta alat-alat berat yang harga jual/sewanya digunakan sebagai dasar penghitungan IKK disebut sebagai paket komoditas. Adapun paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2011 terdiri atas 22 *item* yang meliputi 17 jenis bahan bangunan, 4 alat berat (harga sewa) serta upah, dengan rincian sebagai berikut :

- Bahan Bangunan : pasir, batu, papan, balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi, aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, keramik lantai, besi beton, seng plat dan seng gelombang



- Alat Berat : excavator, bulldozer, three wheel roller  
(mesin gilasi) dan dump truck

Jenis-jenis bahan bangunan serta alat berat tersebut dipilih karena mempunyai nilai atau andil yang cukup besar dalam membangun setiap kelompok jenis bangunan serta harga/harga sewa dari barang-barang tersebut mempunyai keterbandingan/*comparable* antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Selain beberapa konsep dan definisi yang telah dijelaskan di atas, masih ada beberapa konsep dan definisi lainnya yang berkaitan dengan penghitungan IKK, antara lain :

- **Harga produsen** ialah harga transaksi yang terjadi antara produsen/penghasil dan pedagang besar pertama dalam jumlah besar atas suatu jenis barang.
- **Harga Perdagangan Besar (HPB)** ialah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli, secara *party/grosir* di pasar pertama atas suatu barang.
- **Pedagang Besar (PB)** ialah pengusaha/pedagang yang menjual barang secara *party/grosir* atau dalam jumlah besar.

- **Party/Grosir** atau pembelian dalam jumlah besar yang di maksud adalah bukan eceran. Batas pembelian secara *party/grosir* adalah relatif, mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.
- **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, minggu, atau bulan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah satu unit/hari.
- **Harga bahan bangunan/konstruksi** adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (*party/grosir*) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/supplier bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.
- **Upah** adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kegiatan konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang. Satuan/unit yang digunakan dalam upah jasa ini adalah satu orang/hari.

- **Inflator** merupakan nilai yang digunakan sebagai penyesuaian IKK terhadap kenaikan bahan bangunan/konstruksi.
- **Diagram timbang/bobot** terdiri atas diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan digunakan untuk menghitung tingkat kemahalan konstruksi (TKK), yang disusun berdasarkan atas kuantitas/*volume* bahan-bahan bangunan/konstruksi termasuk sewa alat yang dibutuhkan untuk membangun (satu) unit jenis bangunan per satuan ukuran luas. Sedangkan, diagram timbang umum digunakan untuk menghitung indeks kemahalan konstruksi (IKK) umum, yang disusun berdasarkan perkiraan persentase pengeluaran untuk pembangunan fisik yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

### BAB III

## METODOLOGI

Penghitungan IKK kabupaten/kota dan provinsi terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1. penentuan paket komoditas.
2. penghitungan tingkat kemahalan konstruksi (TKK).
3. penghitungan indeks kemahalan konstruksi (IKK).

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung TKK dan IKK adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kontruksi ke-j untuk *level* kabupaten/kota ( $TKK_{kab}$ )<sub>j</sub> :

$$(TKK_{kab})_j = \sum_{i=1}^{22} P_i \cdot Q_{ij}$$

i = jenis barang/bahan bangunan, sewa alat berat, dan upah

j = kelompok jenis bangunan konstruksi (j=1,2,3)

Pi = harga jenis barang/bahan bangunan, sewa alatberat, dan upah

$Q_{ij}$  = kuantitas /*volume* bahan bangunan, sewa alat berat, dan upah ke- $i$  pada kelompok jenis bangunan konstruksi ke- $j$  (diagram timbang kelompok jenis bangunan)

- b. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Konstruksi ke- $j$  untuk *level* provinsi  $(TKK_{prov})_j$  :

$$(TKK_{prov})_j = \frac{\sum_{k=1}^N (TKK_{kab})_j}{N}$$

$(TKK_{kab})_j$  : Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kontruksi ke- $j$  kabupaten/kota.

$N$  : Jumlah kabupaten/kota yang dimiliki oleh suatu provinsi.

- c. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Konstruksi ke-j untuk *level* nasional  $(TKK_{nas})_j$  :

$$(TKK_{nas})_j = \frac{\sum_{k=1}^N (TKK_{kab})_j}{N}$$

$(TKK_{kab})_j$  : Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kontruksi ke-j kabupaten/kota.

N : jumlah seluruh kabupaten/kota yang ada di Seluruh Indonesia, yaitu 491.

- d. Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan ke-j untuk *level* kabupaten/kota  $(IKK_{kab})_j$  :

$$(IKK_{kab})_j = \frac{(TKK_{kab})_j}{(TKK_{nas})_j} \times 100$$

$(TKK_{kab})_j$  : Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kontruksi ke-j kabupaten/kota.

(TKK<sub>nas</sub>)<sub>j</sub> : Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis  
Bangunan Konstruksi ke-j untuk *level* nasional

- e. Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan ke-j untuk  
*level* provinsi (IKK<sub>prov</sub>)<sub>j</sub> :

$$(IKK_{prov})_j = \frac{(TKK_{prov})_j}{(TKK_{nas})_j} \times 100$$

(TKK<sub>prov</sub>)<sub>j</sub> : Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis  
Bangunan Konstruksi  
ke-j untuk *level* provinsi.

(TKK<sub>nas</sub>)<sub>j</sub> : Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis  
Bangunan Konstruksi  
ke-j untuk *level* nasional

- f. Indeks Kemahalan Konstruksi Umum untuk *level* kabupaten/kota  
(IKK<sub>umumkab/kota</sub>) :

$$(IKK_{umumkab/kota}) = \frac{\sum_{j=1}^3 ((IKK_{kab})_j \cdot Q_j)}{IKK_{kab/kota} \text{ acuan}} \times 100$$

- (IKK<sub>kab</sub>)<sub>j</sub> : Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis  
 Bangunan ke-j untuk *level* kabupaten/kota
- Q<sub>j</sub> : Diagram timbang IKK umum kabupaten/kota

\*IKK kab/kota acuan yang digunakan pada tahun 2011 adalah IKK Kota Samarinda, yaitu sebesar 103,57

- g. Indeks Kemahalan Konstruksi Umum untuk *level* provinsi

(IKK<sub>umumprov</sub>) :

$$(IKK_{umumprov}) = \frac{\sum_{j=1}^3 ((IKK_{prov})_j \cdot Q_j)}{IKK \text{ provinsi acuan}} \times 100$$

- (IKK<sub>prov</sub>)<sub>j</sub> : Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis  
 Bangunan ke-j untuk *level* provinsi
- Q<sub>j</sub> : Diagram timbang IKK umum provinsi

\*IKK provinsi acuan yang digunakan pada tahun 2011 adalah IKK provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 103,57



## **BAB IV**

### **PERKEMBANGAN IKK**

#### **4.1 Perkembangan Metode Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)**

Metode Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi hingga tahun 2009 disajikan dengan menggunakan IKK rata-rata nasional sama dengan 100 yang kemudian dikalikan dengan suatu bilangan/inflator sehingga diperoleh angka provinsi dan kabupaten/kota. Inflator tersebut didapatkan dari Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan-bahan bangunan/konstruksi.

Pada tahun 2004 angka IKK rata-rata nasional sama dengan 100, kemudian pada tahun 2005 angka IKK rata-rata nasional tersebut disesuaikan menjadi 125,10; karena adanya kenaikan sebesar 25,10 persen pada perkembangan IHPB bahan-bahan bangunan/konstruksi dari bulan Februari 2004 ke bulan Mei 2005.

Selanjutnya pada tahun 2006 angka IKK rata-rata nasional adalah 150,92; sebagai hasil penyesuaian terhadap kenaikan IHPB bahan-bahan bangunan/konstruksi dari bulan Februari 2004 ke bulan Mei 2006. Pada tahun 2007, angka IKK rata-rata nasional adalah 170,17 disesuaikan dengan

kenaikan IHPB barang-barang konstruksi dari bulan Februari 2004 ke bulan April 2007.

Demikian halnya di tahun 2008, melalui penyesuaian kenaikan IHPB konstruksi bulan Februari 2004 – Mei 2008, IKK rata-rata nasional tahun 2008 menjadi 204,79 dan di tahun 2009 kembali naik menjadi 231,60 yang merupakan penyesuaian kenaikan IHPB konstruksi bulan Februari 2004 – Mei 2009. Periode penyesuaian ini mengikuti bulan dilaksanakannya survei harga secara serentak diseluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Namun sejak tahun 2010, penghitungan IKK disajikan dengan model yang berbeda yaitu dengan menentukan salah satu ibukota provinsi, dimana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki angka IKK yang mendekati angka IKK rata-rata nasional untuk kemudian dijadikan sebagai kota acuan atau provinsi acuan dalam penghitungan IKK kabupaten/kota lainnya.

Pada tahun 2010, Kota Samarinda adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki angka IKK sebesar 100,08 dimana angka tersebut adalah angka yang paling mendekati rata-rata IKK dari 491 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yaitu sebesar 100. Oleh karena itu, IKK Kota Samarinda dipilih sebagai IKK kabupaten/kota acuan dalam penghitungan IKK 2010 dan hal tersebut berlanjut hingga penghitungan IKK 2012.

Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah untuk memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK kedepannya apabila terdapat penambahan jumlah kabupaten/kota (hasil pemekaran wilayah) yang akan dihitung IKK-nya. Selain itu, pada umumnya literatur yang membahas indeks spasial seperti IKK memang mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar penghitungan.

Perbedaan model penyajian IKK dari sebelum tahun 2009 dengan penyajian IKK di tahun 2010 dan setelahnya menyebabkan angka-angka yang ada pada dua periode tersebut tidak dapat diperbandingkan secara langsung sehingga memerlukan langkah-langkah lebih lanjut lagi untuk membandingkannya.

#### **4.2 Pertumbuhan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Toraja Utara**

IKK Kabupaten Toraja Utara mulai dihitung tersendiri sejak tahun 2009, dimana pada tahun-tahun sebelumnya masih tergabung dengan kabupaten induk yaitu Kabupaten Tana Toraja). IKK kabupaten Toraja Utara pada tahun 2009 adalah sebesar 209,73, yang merupakan IKK tertinggi keempat di wilayah Sulawesi Selatan, setelah kabupaten Selayar, kabupaten Luwu Timur dan kabupaten Luwu Utara. Besaran IKK pada tahun tersebut di seluruh wilayah Sulawesi Selatan tampak tidak jauh berbeda antara kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota lainnya.

Kota Makassar, yang memiliki nilai IKK yang terkecil pada saat itu, hanya terpaut sekitar 9 persen dengan Toraja Utara dan 25 persen dengan Selayar. IKK Provinsi Sulawesi Selatan sendiri pada saat itu adalah 209,38 atau hanya 0,65 persen lebih rendah daripada IKK Toraja Utara. Besarnya angka IKK yang terjadi pada tahun 2009 dipicu oleh terjadinya krisis ekonomi dan tidak kondusifnya situasi sosial ekonomi masyarakat ketika masa awal reformasi yang melanda Indonesia pada medio 2008-2009.

Di tahun 2010, IKK Toraja Utara adalah sebesar 90,98 dan belum bergerak dari posisi tertinggi ke-empat di wilayah Sulawesi Selatan. Penurunan yang cukup drastis dari pencapaian tahun lalu tersebut bukan dikarenakan oleh penurunan tajam harga bahan-bahan bangunan/konstruksi melainkan dikarenakan oleh perbedaan metode penghitungan yang digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Selayar tetap menjadi kabupaten/kota dengan angka IKK tertinggi, yaitu sebesar 103,87 atau lebih besar sekitar 13 persen dari IKK Toraja Utara. Sedangkan, angka IKK yang terendah dimiliki oleh Kota Makassar, yaitu sebesar 82,27 atau lebih kecil 8,71 persen dari Toraja Utara. Sementara itu, IKK Provinsi Sulawesi Selatan berada pada angka 85,99 atau dengan kata lain terpaut lima persen lebih kecil jika dibandingkan dengan Toraja Utara.

Berlanjut memasuki tahun 2011, IKK Toraja Utara mengalami peningkatan sebesar 5,95 persen dari tahun 2010, yaitu mencapai angka 96,93. Peningkatan juga terjadi pada IKK Kota Makassar yang melejit

hingga 86,69 atau naik sekitar 0,054 persen. Hal tersebut tidak sejalan dengan IKK Provinsi Sulawesi Selatan dan IKK Kabupaten Selayar yang justru mengalami penurunan. IKK Provinsi Sulawesi Selatan turun sebesar 0,74 persen ke angka 85,25; sedangkan IKK Kabupaten Selayar terdegredasi sebanyak 2,55 persen menembus angka 101,32.

Pada tahun 2012 Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan nilai IKK yang cukup drastis hingga menembus angka 106,23 dimana nilai tersebut menempatkan Kabupaten Toraja Utara sebagai wilayah kabupaten/kota dengan nilai IKK tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi serupa juga dialami oleh Kabupaten Tana Toraja yang nilai IKK-nya berada di posisi kedua tertinggi setelah kabupaten Toraja Utara, yakni sebesar 105,95. Mengacu pada jarak antara keduanya yang sangat dekat dan merupakan suatu kesatuan wilayah yang sama sebelum terjadi pemekaran, yang mengukuhkan Toraja Utara sebagai kabupaten baru pada tahun 2008, tak heran jika kondisi yang berlaku antara Tana Toraja dan Toraja Utara hanya berbeda sedikit saja. Kabupaten Selayar, yang pada tahun sebelumnya merupakan wilayah dengan nilai IKK yang tertinggi se-Sulawesi Selatan, bergeser ke posisi ketiga dengan nilai IKK sebesar 105,78. IKK Provinsi Sulawesi Selatan sendiri berada jauh dibawah besaran IKK dari tiga kabupaten/kota di atas, yaitu hanya sebesar 86,51. Hal tersebut mengindikasikan perbedaan harga barang-barang dan jasa konstruksi antara Makassar dan Toraja Utara sebesar 20%.

**Tabel 4.1**  
**Perbandingan Nilai IKK di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2010 - 2012**

Wilayah	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Selayar	103,87	101,32	105,78
Kab. Tana Toraja	90,80	99,17	105,95
Kab. Toraja Utara	90,98	96,93	106,23
Kota Palopo	90	90	87,17
Kota Makassar	82,27	86,69	85,02
Provinsi Sulawesi Selatan	85,99	85,25	86,51

Dengan menyimak deskripsi di atas, terlihat jelas bahwa Toraja Utara memiliki angka IKK yang lebih besar daripada angka IKK rata-rata provinsi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa harga bahan-bahan bangunan/konstruksi, upah serta harga sewa alat-alat berat di Toraja Utara cenderung lebih tinggi daripada harga rata-rata yang berlaku di wilayah

Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan Toraja Utara yang belum mampu menyediakan kebutuhannya sendiri terhadap sebagian besar jenis barang-barang bangunan dan jasa konstruksi sehingga perlu melakukan “impor” dari daerah-daerah lainnya, seperti Palopo dan Makassar, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan impor barang dan jasa tersebut kemudian mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa mengingat letak geografis Toraja Utara yang berada di pegunungan dengan medan yang cukup sulit dan banyaknya infrastruktur jalan yang masih di bawah standar kepatutan serta jarak yang cukup jauh dan memakan waktu dari ibukota provinsi yang menyebabkan proses pendistribusian barang-barang menjadi mahal akibat ongkos pengiriman/*shipping* yang besar.

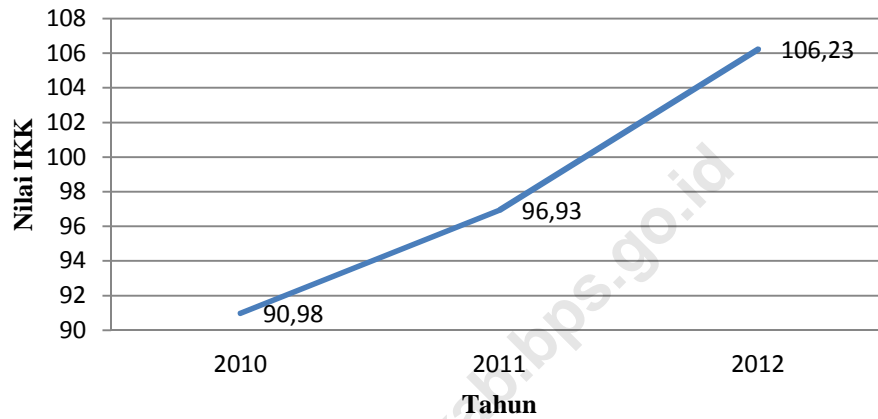
## BAB V

### KESIMPULAN

Secara berturut-turut sejak tahun 2009 hingga 2011 angka indeks kemahalan konstruksi (IKK) yang berlaku di Toraja Utara selalu menempati posisi tiga besar yang tertinggi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan kemudian naik menjadi peringkat satu tertinggi pada tahun 2012. Selain disebabkan oleh lokasi Toraja Utara yang berada di daerah pegunungan dengan jarak tempuh yang jauh dari ibukota provinsi dan medan jalan yang cukup sulit, penyebab utama tingginya nilai IKK di Toraja Utara adalah belum memadainya kemampuan Toraja Utara dalam memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap barang-barang dan jasa di sektor bangunan/konstruksi. Kelemahan tersebut memaksa Toraja Utara untuk membeli barang-barang serta jasa tersebut dari daerah lain guna mengatasi kebutuhan domestiknya. Sebagai konsekuensinya, Toraja Utara harus membayar lebih dalam proses pendistribusian barang-barang dan jasa tersebut dari daerah asal pembeliannya masing-masing atau yang biasa disebut dengan ongkos angkut/*shipping*. Hal itulah yang kemudian turut berperan dalam mendongkrak harga barang-barang bahan bangunan dan jasa konstruksi di Toraja Utara.



**Grafik 5.1**  
**Laju Nilai IKK Kabupaten Toraja Utara**  
**Tahun 2010-2012**



Dengan angka indeks kemahalan konstruksi yang tinggi tersebut, Toraja Utara seyogyanya mendapatkan bagian atau *share* dana alokasi umum (DAU) yang lebih besar melalui jumlah celah fiskal yang bertambah. Oleh karena itu, Toraja Utara memiliki kesempatan yang besar untuk mewujudkan peningkatan serta pemerataan pelayanan publik di wilayahnya serta mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dengan daerah lainnya. Hal tersebut merupakan tantangan sekaligus tanggung jawab yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara.

**Tabel 1.**  
**Indeks Harga Kemahalan Konstruksi (IKK) Sulawesi Selatan**  
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2006**

Kode	Kabupaten/Kota	IKK		
		2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7301	Selayar	101,23	125,13	151,49
7302	Bulukumba	96,18	116,52	142,17
7303	Bantaeng	96,15	119,40	143,40
7304	Jeneponto	95,56	117,69	140,16
7305	Takalar	96,77	119,05	140,79
7306	Gowa	96,14	115,94	138,60
7307	Sinjai	96,91	119,15	142,09
7308	Maros	97,51	119,98	142,29
7309	Pangkep	98,38	118,26	141,02
7310	Barru	96,86	117,36	140,97
7311	Bone	96,94	118,08	142,92
7312	Soppeng	96,52	116,72	140,64
7313	Wajo	94,38	116,23	141,49
7314	Sidrap	94,51	117,23	139,15
7315	Pinrang	96,98	117,39	139,25
7316	Enrekang	95,84	115,78	139,04
7317	Luwu	96,73	118,19	143,03
7318	Tana Toraja	97,34	119,26	142,95
7322	Luwu Utara	94,90	119,52	143,80
7325	Luwu Timur	-	120,07	144,43
7371	Makassar	95,76	113,95	135,84
7372	Pare Pare	94,70	114,72	137,94
7373	Palopo	93,99	117,02	141,85
<b>73</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>96,38</b>	<b>117,94</b>	<b>141,54</b>

**Tabel 2.**  
**Indeks Harga Kemahalan Konstruksi (IKK) Sulawesi Selatan**  
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007-2009**

Kode	Kabupaten/Kota	IKK		
		2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7301	Selayar	170,29	203,79	225,64
7302	Bulukumba	155,35	186,87	206,47
7303	Bantaeng	158,46	183,39	202,49
7304	Jeneponto	153,68	183,11	202,23
7305	Takalar	150,83	182,81	202,40
7306	Gowa	153,78	181,93	201,15
7307	Sinjai	155,93	187,10	207,73
7308	Maros	157,54	182,23	201,16
7309	Pangkep	160,90	184,24	205,25
7310	Barru	156,23	182,60	201,59
7311	Bone	158,26	185,88	206,72
7312	Soppeng	154,75	184,69	205,78
7313	Wajo	154,94	186,61	206,19
7314	Sidrap	153,90	184,43	205,39
7315	Pinrang	155,62	182,70	202,08
7316	Enrekang	158,99	187,65	208,70
7317	Luwu	161,00	187,62	207,02
7318	Tana Toraja	158,59	187,90	209,61
7322	Luwu Utara	160,57	194,25	215,96
7325	Luwu Timur	163,02	195,06	216,78
<b>7326</b>	<b>Toraja Utara</b>	-	-	<b>209,73</b>
7371	Makassar	152,18	181,42	200,87
7372	Pare Pare	154,26	182,71	201,64
7373	Palopo	155,38	187,03	207,59
<b>73</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>157,15</b>	<b>186,35</b>	<b>206,67</b>

**Tabel 3.**  
**Indeks Harga Kemahalan Konstruksi (IKK) Sulawesi Selatan**  
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2012**

Kode	Kabupaten/Kota	IKK		
		2010	2011	2012
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
7301	Selayar	103,87	101,32	105,78
7302	Bulukumba	87,48	87,87	97,49
7303	Bantaeng	86,12	83,82	92,24
7304	Jeneponto	85,00	86,25	82,87
7305	Takalar	85,35	83,35	92,11
7306	Gowa	82,35	82,39	81,19
7307	Sinjai	89,94	88,12	87,6
7308	Maros	83,76	83,96	88,75
7309	Pangkep	87,02	87,16	103,73
7310	Barru	84,16	83,67	92,38
7311	Bone	87,54	86,56	95,16
7312	Soppeng	87,23	86,02	92,27
7313	Wajo	87,45	91,29	96,49
7314	Sidrap	87,13	86,39	89,95
7315	Pinrang	84,58	84,02	90,43
7316	Enrekang	90,64	96,47	95,24
7317	Luwu	87,74	89,89	99,76
7318	Tana Toraja	90,80	99,17	105,95
7322	Luwu Utara	93,44	93,75	92,37
7325	Luwu Timur	97,26	93,62	93,96
<b>7326</b>	<b>Toraja Utara</b>	<b>90,98</b>	<b>96,93</b>	<b>106,23</b>
7371	Makassar	82,27	86,69	85,02
7372	Pare Pare	84,32	83,22	91,71
7373	Palopo	89,85	90,34	87,17
<b>73</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>85,99</b>	<b>85,25</b>	<b>86,51</b>